

**Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan
Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS Di Indonesia Dan Malaysia**

JUNJAR ANES MARLIASIWI

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
juniaraness@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to verify the influence of corporate governance mechanisms to mandatory disclosure convergence of IFRS on Manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange and Malaysia Stock Exchange period 2012-2014. The variables tested in this study consisted the proportion of commissioners board, commissioners independent board, the number of audit committee, and the number of audit committee meetings. This study using purposive sampling method in determining the number of samples used, obtained 225 Indonesian manufacturing companies and 489 manufacturing companies in Malaysia. Tests performed include: descriptive statistics, classical assumptions, regression, F test, t test, chow test and coefficient of determination.

Results of the study: 1) the proportion of commissioners board did not affect the level of compliance of mandatory disclosure in Indonesia and Malaysia, 2) the commissioners independent board and the number of audit committee negatively affect the level of mandatory disclosure in Indonesia, while in Malaysia has no effect, 3) the number of audit committee meetings positively affects the level of compliance of mandatory disclosure in Indonesia and Malaysia, 4) there are differences in the level of compliance with mandatory disclosure of IFRS convergence in Indonesia and Malaysia, 5) there are differences effect of corporate governance mechanisms on compliance mandatory disclosure in Indonesia and Malaysia.

Keywords: Proportion commissioners board, commissioners independent board, the number of audit committee, the number of audit committee meetings, mandatory disclosure.

I. PENDAHULUAN

Pengambilan kebijakan suatu perusahaan merupakan hal biasa yang terjadi pada para pelaku ekonomi dengan didasarkan kepada data-data akuntansi, sehingga konvergensi *IFRS* mempunyai dampak besar bagi dunia usaha yang perkembangannya semakin pesat. Konvergensi standar akuntansi dapat dilakukan dengan cara harmonisasi (membuat standar sendiri yang tidak berkonflik dengan *IFRS*), adaptasi (membuat standar sendiri yang disesuaikan dengan *IFRS*), atau adopsi penuh (mengambil langsung dari *IFRS*). Memilih dengan cara adopsi penuh, tidak memerlukan rekonsiliasi signifikan terhadap laporan yang dilakukan berdasarkan *IFRS*. Beberapa mafaat diantaranya : transparansi yang dilakukan oleh perusahaan akan mampu meningkatkan investasi global, pemahaman laporan keuangan yang menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku internasional diharapkan akan semakin mudah, membuka peluang *fund rising* melalui pasar modal global akan menurunkan modal dan menciptakan efisiensi laporan keuangan. Meningkatkan arus investasi global melalui keterbandingan pengungkapan laporan keuangan.

Sebagai salah satu upaya transparansi, maka perlu dilakukan pengungkapan atas laporan keuangan yang secara konseptual merupakan bagian integral dari suatu laporan keuangan perusahaan (Suwardjono, 2005). Pengungkapan dikelompokkan menjadi pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

Pengungkapan yang bersifat wajib meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan yang wajib dilaporkan perusahaan kepada publik menjadi dasar investor untuk mengambil keputusan investasi yang akan dilakukan. Tanpa peraturan mengenai pengungkapan wajib dalam laporan keuangan dapat memberikan kesempatan perusahaan untuk menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diungkapkan sehingga diperlukan peraturan mengenai hal tersebut untuk melindungi kepentingan investor (Prawinandi *et al.*, 2012).

Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) mempunyai fungsi memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, dan adanya pengendalian terkait dengan kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi (Adina dan Ion, 2008). Maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa perusahaan manufaktur di pasar modal menunjukkan dibutuhkannya pengungkapan dan transparansi untuk menghindari terjadinya pelanggaran berkelanjutan yang dapat merugikan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung, hal ini menunjukkan masih kurangnya pengungkapan wajib yang dilakukan oleh perusahaan.

Penerapan standar akuntansi berbasis *IFRS* belum dapat menjamin perusahaan akan melakukan pengungkapan yang lebih tinggi. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem institusional yaitu struktur *corporate governance* untuk mengawasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Prinsip

corporate governance menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan mengingat seringnya terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham atau komisaris dan para direktur dalam pengambilan keputusan (Hamzah dan Suparjan, 2009).

Menurut *Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI, 2001)* tujuan *corporate governance* untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Salah satu cara yang paling efisien untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan adalah adanya peraturan dan mekanisme pengendalian yang secara efektif mengarahkan kegiatan operasional perusahaan (Ilona dan Zaitul, 2006).

Supriyono *et al.* (2014) meneliti mengenai Pengaruh *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012. Hasil dari penelitian adalah tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* untuk industri perbankan di Indonesia memiliki rerata 75,92%.

Penelitian ini menguji kembali tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* dengan variabel independen proporsi dewan komisaris, dewan komisaris independen, jumlah komite audit, dan jumlah rapat komite audit.

Proporsi dewan komisaris merupakan banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum/khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dengan adanya pengawasan tersebut, diharapkan perusahaan akan meningkatkan pelaporan informasi di perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyono *et al.* (2014) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *mandatory disclosure*. Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi *et al.* (2012), serta Pitasari dan Septiani (2014) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure*.

Menurut Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia (2006), komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Butir 1-A dari Peraturan Pencatatan Efek PT Bursa Efek Indonesia mengenai Ketentuan Umum Pencatatan Efek yang bersifat ekuitas di bursa menyatakan bahwa jumlah komisaris independen harus proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yang bukan merupakan pemegang saham pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Prawinandi *et al.* (2012) didapatkan hasil bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat

kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Utami *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*.

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Perihal keanggotaan komite audit yang diatur dalam Surat Edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.SE008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 menyebutkan bahwa komite audit sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris maksimum hanya 1 orang. Keefektifan peran komite audit ini didukung oleh keberadaan komite audit independen (Nafisah, 2011). Semakin banyak anggota komite audit independen maka semakin berkualitas pula laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyono *et al.* (2014), Pitasari dan Septiani (2014) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian oleh Prawinandi *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *mandatory disclosure*.

Menurut *corporate governance guidelines* dalam menjalankan tugasnya, komite audit minimal mengadakan rapat 4 kali dalam satu tahun

(Suhardjanto, 2010). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja agar sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Mengacu dari penelitian terdahulu dan mengembangkan model penelitian yang dilakukan oleh Supriyono *et al.* (2014) maka penelitian ini mencoba untuk meneliti kembali untuk membandingkan penerapan dan pengaruh dari variabel-variabel yang diteliti dari 2 negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Malaysia dengan judul **“Pengaruh mekanisme Corporate Governance terhadap tingkat kepatuhan Mandatory Disclosure konvergi IFRS di Indonesia dan Malaysia”** (Studi Empiris pada perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malaysia tahun 2012-2014).

Perbedaan penelitian ini dengan terdahulu adalah membandingkan kedua Negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, mengganti *sample* perusahaan yang sebelumnya menggunakan perbankan menjadi manufaktur, memperbarui tahun *sample* penelitian yang sebelumnya menggunakan data tahun 2009-2012 menjadi 2012-2014, dan mengganti item *checklist* yang sebelumnya menggunakan item dari *Delloitte* menjadi *PriceWaterhouse (PwC)*.

II. KERANGKA TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESIS

A. Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*)

dan manajer (*agency*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut.

B. Mekanisme *corporate governance*

Tujuan dari mekanisme *corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Mekanisme *corporate governance* digunakan untuk menjelaskan peranan dan perilaku dari dewan direksi, dewan komisaris dan para pemegang saham. *Corporate governance* memiliki tiga komite yaitu komite audit, komite nominasi dan remunerasi. Definisi *corporate governance* didalam *Forum Corporate Governance* Indonesia (2006) adalah: “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”

Tata kelola perusahaan yang baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh *stakeholders*. Pelaksanaan tata kelola perusahaan diperlukan untuk memenuhi kepercayaan bagi masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak industri untuk berkembang dengan baik yang bertujuan mewujudkan *stakeholders value* (Restuningdiah, 2010).

Terdapat lima partisipan struktur *corporate governance* yaitu dewan direksi, *Chief Executive Officer (CEO)*, dewan komisaris, *auditor*, dan *stakeholders*. Dewan direksi merupakan organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dengan mencapai tujuan perusahaan. Tugas utama *CEO* adalah menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin untuk mengamankan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Lins dan Warnock (2004) secara umum mekanisme yang dapat mengendalikan perilaku manajemen atau sering disebut mekanisme *corporate governance* dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*.

C. International Financial Reporting Standard (IFRS)

IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh *International Accounting Standard Board (IASB)*. Standar Akuntansi Internasional disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu *IASB*, *European Commission (EC)*, *International Organization of Securities Commissions (IOSOC)*, dan *International Federation of Accountant (IFAC)*.

Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi. *Pertama*, berkaitan dengan definisi elemen laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan. Definisi digunakan dalam standar akuntansi

untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan biaya. *Kedua*, pengukuran dan penilaian. Pedoman ini digunakan untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan (pada tanggal neraca). *Ketiga*, tentang pengakuan. Kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan. *Keempat*, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Komponen ini digunakan untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

D. Pengungkapan informasi keuangan (*disclosure*)

Pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan keuangan merupakan penyajian informasi yang diperlukan untuk berlangsungnya pasar modal yang efisien secara optimum. Banyaknya informasi yang diungkap tidak hanya tergantung pada keahlian pembaca tetapi juga standar yang dianggap cukup. Dasar perlunya praktek pengungkapan laporan keuangan oleh manajemen kepada pemegang saham dijelaskan dalam *agency theory*.

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

Perusahaan *go public* dan multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan *IFRS* untuk

penyusunan laporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2012. Indonesia melakukan konvergensi *IFRS* secara bertahap sejak 2008 hingga 2011 dimana tahap-tahap tersebut terdiri dari tahap adopsi pada tahun 2008 hingga tahun 2010, tahap persiapan akhir yang dilaksanakan selama tahun 2011 dan tahap pengimplementasian PSAK berbasis *IFRS* serta dilakukan evaluasi secara komprehensif mulai tahun 2012 (Prawinandi et al., 2012).

PwC (Pricewaterhouse) mengeluarkan *checklist* yang bisa dijadikan pedoman dalam pengukuran tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*. Item-item yang dipilih dari *checklist* ini disesuaikan dengan PSAK yang berlaku di setiap negara yang wajib diterapkan pada periode tahun yang diteliti.

E. Hubungan ukuran dewan komisaris dengan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*.

Menurut Abeysekera (2008) ukuran dewan komisaris yang efektif berada pada rentang lebih dari lima orang dan kurang dari 14 orang. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen maka pengawasan terhadap kinerja *CEO* akan semakin tinggi, sehingga kinerja di perusahaan tersebut akan semakin baik. Dengan adanya peningkatan kinerja, maka transparansi dalam pelaporan keuangan akan baik (Pitasari dan Septiani, 2014). Inti dari *corporate governance* ada pada dewan komisaris karena tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi dan mengevaluasi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh dewan direksi.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H_{1a} : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia.

H_{1b} : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Malaysia.

F. Hubungan proporsi komisaris independen dengan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*.

Komisaris independen harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan yang transparan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*. Hasil penelitian Huafang dan Jianguo (2007) juga menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan. Hasil penelitian Prawinandi *et al.* (2012), menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan.

Hasil penelitian Klein (2002), Peasnell *et al.* (2001), Chtourou *et al.* (2001), Pratana dan Mas'ud (2003), dan Xie *et al.* (2003) memberikan simpulan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau *outside director* dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Sehingga, jika anggota dewan komisaris dari luar meningkatkan tindakan pengawasan, hal ini juga akan berhubungan dengan makin rendahnya penggunaan *discretionary accruals* (Cornett *et al.* 2006).

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H_{2a} : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia.

H_{2b} : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Malaysia.

G. Hubungan ukuran komite audit dengan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*.

Jumlah komite audit yang bertugas menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*.

Penelitian Kent dan Stewart (2008) di Australia menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit mempengaruhi kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan *IFRS*, dimana di dalamnya termasuk *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

H_{3a} : Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia.

H_{3b} : Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Malaysia.

H. Hubungan jumlah rapat audit dengan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam sistem pelaporan keuangan, komite audit perlu mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam setahun. Semakin tinggi intensitas pertemuan yang diadakan oleh komite audit memudahkan untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen sehingga meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib.

Hasil penelitian Supriyono *et al.* (2014), menunjukkan bahwa jumlah rapat komite berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan karena semakin tingginya tingkat pengawasan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja didalam perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis keempat penelitian ini adalah:

H_{4a} : Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS di Indonesia.

H_{4b} : Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS di Malaysia.

I. Perbedaan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS di Negara Indonesia Dan Malaysia

Indeks harga saham gabungan (IHSG) di pasar modal Indonesian dan bursa Malaysia menjadi paling positif dibandingkan dengan negara lain di Asean. (Sukirno, 2015)

Pasar modal Indonesia memiliki potensi peningkatan dan prospek yang cukup baik. Jumlah perusahaan yang tercatat di BEI pada akhir 2012 berjumlah 459, meningkat sebesar 16,5% dari posisi ditahun 2007. Kapitalisasi pasarnya mencapai 45,18% dari PDB pada tahun 2012, sedangkan rata-rata dunia sebesar 73,92%. Dalam pasar modal Malaysia mengalami penurunan jumlah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Malaysia, pada tahun 2007 tercatat 1.036 perusahaan sedangkan pada tahun 2012 menjadi 921 perusahaan. Kapitalisasi pasar mencapai 156,94% dari PDB tahun 2012.

Di Indonesia, bursa efek mulai mengadakan *Capital Market Awards* dan *IICD Corporate Governance Award*, dan *IICG Award-Most Trusted Award* sebagai penilaian yang dilakukan berdasarkan pada pengungkapan praktik tata kelola perusahaan. Instrumen penilaian adalah *Corporate Governance Scorecard* yang juga digunakan oleh *Institute of Directors* lainnya di beberapa negara *ASEAN*. Sedangkan di Malaysia, terdapat *Malaysia Sustainability Reporting Awards (MASRA)* memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memiliki prospek baik dalam pelaporan keberlanjutan perusahaan, menyajikan laporan keuangan secara lengkap, termasuk lingkungan, ekonomi, dan sosial, serta meningkatkan kesadaran tentang isu-isu transparansi didalam perusahaan.

Financial Reporting Foundation (FRF) dan *Malaysian Accounting Standards Board (MASB)* pada tahun 2008 telah mengumumkan pernyataan

rencana Malaysia untuk konvergensi penuh dengan *International Financial Reporting Standard (IFRS)* pada 1 Januari 2012. Untuk memfasilitasi perubahan bertahap ke *IFRS*, tanggal efektif untuk menerapkan *FRS 139 Financial Instruments: Pengakuan dan pengukuran* (setara Malaysia dari *IAS 39*) akan menjadi 1 Januari 2010. Pada 2012, semua standar akuntansi yang berlaku disetujui perusahaan publik, anak perusahaan, dan entitas publik lain akan menerapkan *IFRS* sepenuhnya. Dengan menerapkan *FRS 139* tahun 2010, dan lebih lanjut 2 tahun untuk mengadopsi standar yang tersisa, 2012 dipertimbangkan sebagai tanggal yang tepat untuk konvergensi. *MASB* berharap bahwa dengan pemberitahuan lebih dahulu, perusahaan akan memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri dalam melakukan perubahan.

Sedangkan di Indonesia, pada tahun 2008 dilakukan adopsi seluruh *IFRS* ke *PSAK*, persiapan infrastruktur yang diperlukan, dan evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap *PSAK* yang berlaku. Kemudian pada tahun 2011, dilakukan penyelesaian persiapan infrastruktur yang diperlukan, dan penerapan secara bertahap beberapa *PSAK* berbasis *IFRS*. Tahun 2012, penerapan *PSAK* berbasis *IFRS* secara bertahap, dan mengevaluasi dampak penerapan *PSAK* secara komprehensif.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kelima penelitian ini adalah:

H_{5a} : Terdapat perbedaan secara signifikan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia.

H_{5b} : Terdapat perbedaan signifikan pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia.

III. METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Bursa Malaysia (Kuala Lumpur *Stock Exchange*) tahun 2012-2014. Teknik Pengambilan Sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

A. Model Penelitian

Model persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

$$\text{MDSCORE} = \beta_0 + \beta_1\text{UDK} + \beta_2\text{PKI} + \beta_3\text{UKA} + \beta_4\text{JRKA} + \beta_5\text{PROF} + \beta_6\text{LEV} + \varepsilon$$

Keterangan:

β_0	= konstanta
β	= koefisien regresi
MDSCORE	= Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure
UDK	= Ukuran Dewan Komisaris
PKI	= Proporsi Komisaris Independen
UKA	= Ukuran Komite Audit
JRKA	= Jumlah Rapat Komite Audit
PROF	= Profitabilitas
LEV	= Leverage
ε	= <i>Error</i> (Kesalahan Pengganggu)

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Tabel 1
Indonesia
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	<i>t</i>	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	,546	,023		23,786	,000
	ADK	-,001	,002	-,033	-,498	,619
	DKI	-,127	,021	-,386	-6,041	,000
	JKA	-,015	,007	-,153	-2,322	,021
	JRKA	,002	,001	,140	2,238	,026

a Dependent Variable: MDSC

Berdasarkan pengujian pada Tabel 4.17 dapat dirumuskan model regresi sebagai berikut:

$$\text{MDScore} = 0,546 - 0,001(\text{ADK}) - 0,127(\text{DKI}) - 0,015(\text{JKA}) + 0,002(\text{JRKA}) + e$$

Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis penelitian :

a. Proporsi dewan komisaris terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan proporsi dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya negatif sebesar -0,001, dengan signifikansi sebesar 0,619 > alpha (0,05) sehingga proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*. Dengan demikian hipotesis pertama (H_{1a}) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dinyatakan **ditolak**.

b. Dewan komisaris independen terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan dewan komisaris independen memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya negatif sebesar $-0,127$ dengan signifikansi sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$ sehingga dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*. Dengan demikian hipotesis kedua (H_{2a}) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dinyatakan **ditolak**.

c. Jumlah komite audit terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan jumlah komite audit memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya negatif sebesar $-0,015$ dengan signifikansi sebesar $0,021 < \alpha (0,05)$ sehingga jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_{3a}) **ditolak**.

d. Jumlah rapat komite audit terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan jumlah rapat komite audit memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar $0,002$ dengan signifikansi sebesar $0,026 < \alpha (0,05)$ sehingga jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*. Dengan demikian hipotesis keempat (H_{4a}) **diterima**.

Tabel 2
Malaysia
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t		Sig.	
	B	Std. Error	Beta	B	Std. Error		
1	(Constant)	,443			,018	25,038	,000
	ADK	-,002		-,088	,001	-1,723	,085
	DKI	-,011		-,045	,013	-,874	,383
	JKA	,003		,044	,003	,957	,339
	JRKA	,007		,132	,002	2,915	,004

a Dependent Variable: MDSC

Berdasarkan pengujian pada Tabel 4.18 dapat dirumuskan model regresi sebagai berikut:

$$\text{MDSC} = 0,443 - 0,002(\text{ADK}) - 0,011(\text{DKI}) + 0,003(\text{JKA}) + 0,007(\text{JRKA}) + e$$

Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis penelitian :

- a. Proporsi dewan komisaris terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*

Berdasarkan Tabel 4.18 menunjukkan proporsi dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya negatif sebesar -0,002 dengan signifikansi sebesar 0,085 > alpha (0,05) sehingga proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*. Dengan demikian hipotesis pertama (H_{1b}) **ditolak**.

- b. Dewan komisaris independen terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*

Berdasarkan Tabel 4.18 menunjukkan dewan komisaris independen memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya negatif sebesar -0,011 dengan signifikansi sebesar $0,383 > \alpha (0,05)$ sehingga dewan komisaris independen berpengaruh negative terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*. Dengan demikian hipotesis kedua (H_{2b}) **ditolak**.

c. Jumlah komite audit terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*

Berdasarkan Tabel 4.18 menunjukkan jumlah komite audit memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,003 dengan signifikansi sebesar $0,339 < \alpha (0,05)$ sehingga jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_{3b}) **ditolak**.

d. Jumlah rapat komite audit terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*

Berdasarkan Tabel 4.18 menunjukkan jumlah rapat komite audit memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,007 dengan signifikansi sebesar $0,003 < \alpha (0,05)$ sehingga jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*. Dengan demikian hipotesis keempat (H_{4b}) **diterima**.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pengujian data dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ; Pertama, proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia, tidak berpengaruhnya variabel proporsi dewan komisaris dalam

penelitian dugaan dari peneliti karena jumlah dewan komisaris yang terlalu besar akan lebih sulit dalam proses pengambilan keputusan, banyaknya ide/fikiran masing-masing dewan komisaris akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengambil satu kesimpulan sehingga kinerja menjadi kurang efektif. Di Malaysia, lembaga pengatur selalu melakukan revisi ulang atas aturan-aturan yang mendukung tata kelola perusahaan yang baik sesuai pedoman yang telah dikeluarkan oleh lembaga tertentu. Berdasarkan peraturan dari *Securities Commission of Malaysia (SCM)* tentang “*Inspection dan Inquiry*” bahwa perusahaan harus selalu siap baik dengan adanya pemberitahuan ataupun dengan tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu bahwa dapat dilakukan pemeriksaan dan penyidikan sewaktu-waktu. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyaknya SDM yang ada di perusahaan tidak terlalu berpengaruh karena adanya regulasi yang mengatur untuk memberikan pengungkapan laporan keuangan yang berkualitas baik. Di Malaysia juga didirikan Badan Pencegah Rasuah (BPR) yang bertugas untuk mencegah terjadinya kecurangan atau korupsi di perusahaan sektor swasta maupun publik. Kedua, dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS di Indonesia* dan tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS di Malaysia*, peraturan dewan komisaris independen di Indonesia dan Malaysia sama, yaitu jumlah dewan komisaris independen setidaknya sepertiga (30%) dari jumlah anggota dewan secara keseluruhan, dan tiap proporsi dewan komisaris independen mempunyai reputasi baik, kredibilitas, dan memiliki ketrampilan dan pengalaman

untuk memberikan penilaian secara independen. Ketiga, komite audit berpengaruh negatif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Malaysia, tidak berpengaruhnya komite audit terhadap pengungkapan diduga peneliti karena belum optimalnya kinerja komite audit dalam memantau dan melaksanakan pengendalian internal perusahaan. Adanya beberapa anggota komite audit yang memiliki relasi dengan pengelola perusahaan mempengaruhi independensi yang dimiliki. Keempat, jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia, hasil ini menunjukkan bahwa komite audit mengkomunikasikan setiap hasil rapat kepada pengelola perusahaan, sehingga meminimalisasi adanya kekurangan atau kesalahan dalam pengungkapan laporan. Tindak lanjut dari hasil rapat komite audit menjadi bentuk pengawasan yang lebih baik di perusahaan. Kelima, terdapat perbedaan tingkat *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia, secara keseluruhan dampak penerapan *IFRS* di Indonesia dan Malaysia tidak jauh berbeda yaitu berkaitan dengan perubahan nama laporan keuangan dan item-item yang disajikan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun, regulasi yang cukup tegas di Malaysia mendorong perusahaan untuk menyajikan laporan secara lengkap sesuai yang telah ditetapkan. Sedangkan di Indonesia regulasinya masih terlihat lemah, karena belum adanya aturan untuk menindak secara tegas perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangannya secara berkualitas sehingga menimbulkan adanya manipulasi ataupun sejenisnya.

Keenam, terdapat perbedaan pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia, dilihat dari konsep *corporate governance* antara Indonesia dan Malaysia juga berbeda, dimana Indonesia menggunakan konsep *two tier system* sedangkan Malaysia menggunakan *one tier system*. Perbedaan konsep ini dapat pula menyebabkan perbedaan pengaruh *corporate governance* terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*.

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa saran untuk perbaikan penelitian kedepannya sebagai berikut ; menambah jumlah sampel penelitian dengan memanjangkan periode waktu penelitian agar hasil penelitian dapat lebih mencerminkan kondisi yang sesungguhnya, menggunakan variabel yang lebih luas, menambah beberapa proksi dari mekanisme *corporate governance* seperti komite-komite yang ada di dalam perusahaan, dapat pula mempertimbangkan pengukuran dari *good corporate governance index* atau *rating good corporate governance*, menggunakan *framework* item-item lain selain dari *PriceWaterhouse (PwC)* untuk mengukur *mandatory disclosure* dan juga memperbarui acuan *framework* tersebut sehingga akan lebih sesuai dengan keadaan saat ini, penelitian selanjutnya diharapkan bisa membandingkan dengan negara lain yang masih serumpun (studi komparatif).

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abeysekera, 2008. *The Role of corporate governance in intellectual capital disclosure in Kenyan listed firm*. www.ssrn.com. 14 Agustus 2015, pk 20:15 WIB

Adina, P., dan P. Ion. 2008. *Aspect Regarding Corporate Mandatory and Voluntary Disclosure. Annals Faculty of Economics Journal* 3 (1): 1407-1411.

Chtourou, et al. (2001). *Corporate Governance and Earnings Management. www.ssrn.com*. 20 November 2015.

Cornett et al., 2006. *Earnings Management, Corporate Governance, and True Financial Performance. http://papers.ssrn.com/*. 20 November 2015.

Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2001. *Peranan dewan komisaris dan komite audit dalam pelaksanaan corporate governance. Seri tata kelola perusahaan (corporate governance), Jilid II. Edisi ke-2. Jakarta.*
Hamzah, M.Z., dan Suparjan, A. 2009. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Struktur Modal. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*, Vol. 9, No. 1, April 2009.

Huafang, X., dan Y. Jianguo. 2007. *Ownership Structure, Board Composition and Corporate Voluntary Disclosure. Managerial Auditing Journal* 22 (6): 604-619.

Ilna, D., dan Zaitul., 2006, *Hubungan Informasi Akuntansi Keuangan dan Mekanisme Corporate Governance*, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta.

Jensen, Michael C., Meckling, William H. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Vol 3, No 4.*

Kent, P., dan J. Stewart. 2008. *Corporate Governance and Disclosures on The Transition to International Financial Reporting Standards. Journal of Accounting & Finance* 48 (4): 649-671.

Klein, April. 2002. "Audit Committee, Board Of Director Characteristics and Earnings Management. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 33. No. 3. August.

Lins, Karl V. dan Francis E. Warnock. 2004. *Corporate Governance and the Shareholder Base. International Finance Discussion Papers, Number 816.*

Midiastuty, Pratana P., dan Mas'ud Machfoedz. 2003. Analisis Hubungan Mekanisme *Corporate Governance* dan Indikasi Manajemen Laba. Artikel Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI, Surabaya.

Nafisah, U. 2011. "Peran *Corporate Governance* Dalam Kepatuhan Pengungkapan Wajib: Studi Empiris Badan Usaha Milik Negara". Skripsi Sarjana tak diterbitkan. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Peasnell, K., Pope, P., dan Young, S. 2001. *Board Monitoring and Earnings Management: Do Outside Directors Influence Abnormal Accruals*. Working paper, Lancaster University, Lancaster, U.K.

Pitasari, dan Septiani, 2014. Analisis Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan *Konvergensi IFRS* Pada Laporan Laba Rugi Komprehensif. *Diponegoro Journal Of Accounting*.

Prawinandi, W., Suhardjanto, D., Triatmoko, H., 2012, "Peran struktur *corporate governance* dalam tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*" *Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV*, Aceh.

Restuningdiah, Nurika. 2010. Mekanisme *GCG* Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Social Terhadap Koefisien Respon Laba. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 14, No. 3, hlm. 377-390.

Suhardjanto, D. dan M. Wardhani.2010. Praktik *Intellectual Capital Disclosure* Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 14 (1): 71–85.

Sukirno, Sadono. 2005. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supriyono, Mustaqim, A., Suhardjanto, D., 2014. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi *IFRS* Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII* Lombok.

Utami, Rahmawati., 2008. "Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris dan Keberadaan Komite Audit Terhadap Aktifitas Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta", *Makalah Simposium Nasional Akuntansi*, Yogyakarta.

Utami, Suhardjanto, dan Hartoko., 2012, " Investigasi Dalam Konvergensi *IFRS* di Indonesia: Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dan Kaitannya Dengan Mekanisme *Corporate Governance*," *Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV*, Aceh.

Xie, Biao, Wallace N. Davidson III, dan Peter J. Dadalt. 2003, *Earning Management and Corporate Governance: The Committee. Journal of Corporate Finance Vol. 9 June. P. 295-316.*

LAMPIRAN

Tabel 3

Prosedur Pemilihan Sampel di Indonesia

No	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Total
1.	Perusahaan manufaktur yang <i>listed</i> di BEI	131	134	151	416
2.	Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangannya secara berturut-turut	(20)	(23)	(40)	(83)
3.	Total perusahaan yang dijadikan sampel	111	111	111	333
4.	Data <i>outlier</i>	(36)	(36)	(36)	(108)
Total sample perusahaan yang diteliti		75	75	75	225
Sumber: hasil pengolahan data					

Tabel 4

Prosedur Pemilihan Sampel di Malaysia

No	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Total
1.	Perusahaan manufaktur yang <i>listed</i> di BEI	252	252	264	768
2.	Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangannya secara berturut-turut	(21)	(21)	(33)	(75)
3.	Total perusahaan yang dijadikan sampel	231	231	231	693
4.	Data <i>outlier</i>	(68)	(68)	(68)	(204)
Total sample perusahaan yang diteliti		163	163	163	489
Sumber: hasil pengolahan data					